

## **Multiperspsi Program Strategis Nasional: Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendukung Swasembada Pangan**

**Heru Wansyah Harahap<sup>1\*</sup>, Benita Valda Nabila<sup>2</sup>, Syamuddin Harahap<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pengelolaan Perkebunan, Politeknik LPP Yogyakarta

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Email: [herwansyahharahap@gmail.com](mailto:herwansyahharahap@gmail.com)

---

### Abstrak

Program Strategis Nasional (PSN) mencakup berbagai kebijakan prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang dipandang sebagai instrumen penting untuk pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana sekitar 16,5 juta orang bekerja secara langsung maupun tidak langsung di sektor ini, atau sekitar 6,11% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai sudut pandang atau multiperspsi terhadap pelaksanaan PSR sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis dokumen kebijakan tanpa pengambilan data primer. Data sekunder diperoleh dari publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait pelaksanaan PSR. Hasil kajian menunjukkan bahwa PSR dipersepsi sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta mendorong ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan. Namun demikian, tantangan administratif, keterbatasan pembiayaan, dan lemahnya pendampingan teknis masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Dengan demikian, PSR berpotensi menjadi instrumen efektif pemberdayaan masyarakat perkebunan sekaligus pilar penting dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Kata kunci: Industri kelapa sawit, Peremajaan sawit rakyat, Program strategis nasional, Pemberdayaan masyarakat, Swasembada pangan

---

### Abstract

*The National Strategic Program (NSP) encompasses various government priority initiatives aimed at improving community welfare and strengthening national economic resilience. One of the prominent initiatives is the People's Palm Oil Replanting Program (PSR), which is perceived as an essential instrument for empowering plantation communities through productivity enhancement and institutional strengthening of smallholder farmers. The palm oil industry plays a strategic role in Indonesia's economy, employing approximately 16.5 million people, both directly and indirectly, or about 6.11% of the nation's total population of 270 million. This study aims to examine multiple perspectives on the implementation of PSR as a tool for community empowerment in supporting the achievement of national food self-sufficiency. The research employs a descriptive qualitative approach based on literature review and policy document analysis, without conducting primary data collection. Secondary data were obtained from government publications, academic journals, and institutional reports related to PSR implementation. The results of this review indicate that PSR is perceived as a strategic effort to improve farmers' welfare, strengthen local economic institutions, and enhance food security through optimized utilization of plantation lands. However, several challenges remain, particularly in administrative procedures, financing accessibility, and technical assistance. Therefore, the PSR program holds significant potential as an effective instrument for empowering plantation communities while serving as a vital pillar in supporting the realization of national food self-sufficiency.*

**Keywords:** *Palm oil industry, People's palm oil replanting, National strategic program, Community empowerment, Food self-sufficiency*

---

## PENDAHULUAN

Secara global, industri kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) memegang peranan penting sebagai komoditas minyak nabati yang paling produktif di dunia, menyumbang lebih dari 40% dari total kebutuhan minyak nabati global dan berkontribusi besar terhadap perdagangan internasional. Permintaan minyak sawit meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, kebutuhan energi terbarukan, dan perkembangan industri pangan serta kosmetik (FAO, 2022). Namun, peningkatan produksi sawit seringkali diikuti oleh isu lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan konflik sosial di daerah tropis (Carrasco et al., 2014). Dalam konteks global keberlanjutan, berbagai lembaga internasional dan negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia mulai mendorong praktik pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, salah satunya melalui upaya peremajaan tanaman tua dan pemberdayaan petani kecil (CABI, 2021).

Di tingkat nasional, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 55% terhadap produksi global (BPS, 2023). Sektor kelapa sawit berperan vital dalam perekonomian nasional, menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, atau sekitar 6,11% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa (BPDPKS, 2024). Untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani, pemerintah meluncurkan Program Strategis Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2017. Program ini bertujuan mengganti tanaman sawit rakyat yang sudah tua atau tidak produktif dengan bibit unggul, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses pembiayaan petani (Kementerian Pertanian, 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PSR berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani (Susila et al., 2021; Hidayat et al., 2022). Namun, studi lain menemukan adanya tantangan dalam aspek administrasi, keterlambatan pencairan dana, dan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menghambat pelaksanaan program secara optimal (Rahmawati et al., 2023). Faktor-faktor penghambat dan perbedaan hasil implementasi di lapangan inilah yang kemudian memunculkan beragam persepsi di kalangan pemangku kepentingan.

Pada tingkat lokal, pelaksanaan PSR menimbulkan beragam persepsi di kalangan pemangku kepentingan seperti petani, koperasi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Menurut Saputra et al. (2022), perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh variasi pemahaman terhadap kebijakan, keterbatasan informasi, serta kapasitas kelembagaan yang belum merata di berbagai daerah. Sementara itu, Prasetyo dan Wibowo (2023) menekankan

bahwa keberhasilan PSR tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis replanting, tetapi juga oleh kemampuan program dalam memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat perkebunan. Tinjauan literatur terkini menunjukkan bahwa penelitian mengenai PSR selama ini masih berfokus pada dimensi teknis dan ekonomi. Oleh karena itu, kajian yang secara khusus menganalisis multipersepsi antar pemangku kepentingan menghubungkannya dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap swasembada pangan nasional masih menjadi celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis multipersepsi tersebut sebagai basis perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sudut pandang pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perkebunan kelapa sawit dalam mendukung swasembada pangan nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji berbagai sudut pandang atau multipersepsi terhadap pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena dapat menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan PSR tanpa melakukan pengambilan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data terdiri atas publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta hasil kajian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan PSR.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dokumen untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas, persepsi masyarakat, serta tantangan pelaksanaan PSR dalam konteks pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. Hasil analisis disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis PSR sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

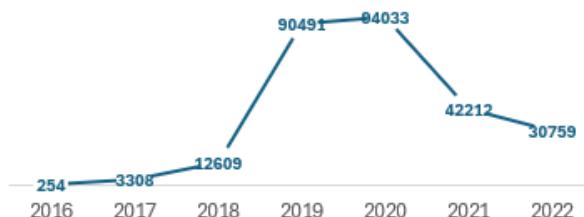
### Gambaran Umum Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu program strategis nasional yang dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui peningkatan produktivitas serta penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Program ini dilaksanakan untuk memperbarui kebun kelapa sawit rakyat yang sudah tua, tidak produktif, atau menggunakan bibit tidak unggul, dengan menggantinya menggunakan bibit baru yang bersertifikat dan memiliki potensi hasil tinggi. Sejak diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PSR diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan tanpa membuka lahan baru, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat dan memperkuat keberlanjutan sektor perkebunan nasional. Presiden Joko Widodo meluncurkan Program PSR pada Oktober 2017 dan berlanjut hingga 2023, menjangkau 142.078 petani kelapa sawit, menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,11 triliun, dan mencakup 326.678 hektare lahan PSR (Lubis, 2025).

Gambar 1. memperlihatkan tren realisasi luas lahan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) periode 2016–2022 yang menunjukkan dinamika capaian sangat fluktuatif. Pada tahun 2016, realisasi PSR masih sangat rendah yakni hanya 254 hektar karena program berada pada tahap uji coba dan persiapan, meskipun pendanaan resmi dari BPDPKS baru dimulai pada tahun 2017 dengan capaian 3.308 ha. Selanjutnya, realisasi meningkat tajam pada tahun 2018 sebesar 12.609 ha, lalu melonjak drastis pada tahun 2019 (90.491 ha) dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020 (94.033 ha). Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antar lembaga pelaksana dan meningkatnya partisipasi petani dalam program PSR. Namun, setelah itu capaian mengalami penurunan signifikan menjadi 42.212 ha pada 2021 dan 30.759 ha pada 2022, yang mencerminkan dampak dari kendala verifikasi status lahan yang semakin panjang dan berjenjang sesuai regulasi baru (Permentan No. 03 Tahun 2022), serta tersendatnya proses pengajuan proposal pada jalur kemitraan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa puncak keberhasilan pelaksanaan PSR terjadi pada periode 2019–2020, sedangkan

penurunan setelahnya menunjukkan tantangan implementasi akibat perubahan kebijakan dan pengetatan persyaratan administratif.

### REALISASI LUAS LAHAN (HA)



Gambar 1. Realisasi luas lahan (Ha) PSR 2016-2022 (BPDPKS, 2023).

Sejalan dengan capaian luas lahan, Gambar 2 menunjukkan bahwa realisasi dana PSR juga mengalami fluktuasi yang serupa selama periode 2016–2022 (BPDPKS, 2022). Pada tahap awal program tahun 2016–2017, alokasi dana masih sangat kecil karena PSR baru memasuki fase persiapan. Kenaikan mulai terjadi pada tahun 2018 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019–2020 dengan realisasi dana mendekati Rp2,7 triliun, mencerminkan intensitas pelaksanaan program yang tinggi dan dukungan kelembagaan yang kuat. Namun, setelah tahun 2020, penyaluran dana menurun seiring berkurangnya realisasi lahan akibat kendala verifikasi status lahan dan pengetatan regulasi teknis. Pola ini menunjukkan bahwa fluktuasi pendanaan PSR erat kaitannya dengan efektivitas kebijakan dan kelancaran proses administratif di lapangan.

### REALISASI DANA PSR (Rp)



Gambar 2. Realisasi dana PSR (Rp) yang disalurkan 2016-2022 (BPDPKS, 2023).

Dalam implementasinya, PSR menekankan empat unsur utama, yaitu aspek legalitas, produktivitas, sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan prinsip keberlanjutan. Unsur legalitas memastikan bahwa lahan kebun peserta PSR memiliki dasar hukum yang sah, sementara unsur produktivitas diarahkan untuk meningkatkan hasil tandan buah segar (TBS) hingga 10 ton per hektar per tahun dengan kepadatan tanaman minimal 80 pohon per hektar. Selain itu, unsur sertifikasi ISPO dan prinsip keberlanjutan

dimaksudkan untuk menjamin penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan, efisien, serta berorientasi pada konservasi sumber daya alam. Melalui pendekatan berbasis kelompok tani dan koperasi, PSR tidak hanya fokus pada aspek teknis budidaya, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan petani, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan keterampilan pengelolaan kebun agar tercipta sistem perkebunan kelapa sawit rakyat yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data sekunder dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2024, realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional telah mencapai sekitar 38.247 hektar, dengan total dana penyaluran sebesar Rp 1,295 triliun (BPDPKS, 2025). Program ini memberikan dukungan pembiayaan kepada pekebun rakyat untuk melakukan peremajaan tanaman sawit yang tidak lagi produktif, dengan skema bantuan pemerintah sebesar Rp 30 juta per hektar, dan mulai tahun 2024 meningkat menjadi Rp 60 juta per hektar sesuai kebijakan terbaru (BPDPKS, 2024; Infosawit, 2024).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PSR berperan strategis dalam memperkuat perekonomian lokal melalui peningkatan produktivitas perkebunan rakyat serta penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan. Secara nasional, program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini juga mendorong kemitraan antara petani, lembaga keuangan, dan perusahaan mitra untuk memperkuat dukungan teknis serta akses modal. Meski demikian, proses pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek verifikasi legalitas lahan, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan pendampingan teknis bagi petani penerima manfaat.

Secara umum, pelaksanaan PSR di Sulawesi menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya regenerasi kebun sawit dan pengelolaan usaha tani berbasis kelembagaan. Program ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan perkebunan rakyat yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

### **Multiperspektif Pemangku Kepentingan dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Petani**

Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran, kepentingan, dan harapan yang berbeda. Perbedaan tersebut membentuk *multiperspektif*

yang mempengaruhi jalannya program, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Setiap aktor memandang PSR dari sudut kepentingannya masing-masing, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap efektivitas program dalam memberdayakan petani dan memperkuat kelembagaan lokal.

Bagi petani, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan manifestasi nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi perkebunan rakyat. Program ini membuka akses petani terhadap bibit unggul, bantuan pembiayaan, serta pelatihan teknis yang berorientasi pada peningkatan produktivitas. Berdasarkan studi literatur Hasbullah et al. (2025), efektivitas PSR sangat dipengaruhi oleh penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi antara petani dan lembaga mitra. Kasus di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, misalnya, menunjukkan bahwa petani yang bermitra dengan perusahaan melalui pembinaan dan pelatihan GAP memperoleh hasil yang lebih optimal dibandingkan petani non-mitra (Hutasuhut, Ayu & Chalil, 2023). Selain itu, dukungan kelembagaan lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terbukti berperan penting dalam memfasilitasi akses petani terhadap dana hibah dan memperlancar proses replanting di lapangan.

Namun, implementasi PSR belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan petani secara merata. Banyak petani kecil menghadapi hambatan administratif dan regulatif, terutama kewajiban menjadi anggota KUD serta syarat adanya *avalis* untuk mendapatkan pembiayaan (Amalia et al., 2017 dalam Hasbullah et al., 2025). Studi di Rokan Hilir dan Siak memperlihatkan bahwa hanya petani anggota KUD seperti KUD Tunas Muda yang memperoleh manfaat penuh program, sementara petani non-anggota belum tersentuh secara signifikan (Asti, Falatehan & Kumala Putri, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu diatasi agar PSR benar-benar inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang memperkuat kapasitas kelembagaan petani, menyederhanakan mekanisme pembiayaan, dan memperluas inklusi bagi petani non-anggota, sehingga PSR tidak hanya berfungsi sebagai program teknis peremajaan tanaman, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput (Hasbullah et al., 2025).

Dari sisi koperasi atau kelompok tani, koperasi berperan sebagai penghubung strategis antara petani dan lembaga pendukung seperti lembaga dana perkebunan, perbankan, serta pemerintah daerah. Meskipun demikian, persepsi mereka terhadap

program tersebut (PSR) seringkali berfluktuasi antara optimisme terhadap peluang dan beban tanggung jawab administratif. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki kapasitas manajerial dan dukungan kelembagaan kuat memandang PSR sebagai peluang nyata untuk memperluas peran ekonomi kolektif petani, melalui akses modal, pasar, dan teknologi. Sebaliknya, koperasi dengan sumber daya terbatas, baik dalam hal SDM, sistem pelaporan maupun pengawasan menilai PSR sebagai beban baru yang meningkatkan tuntutan administratif, pelaporan dan pengawasan ketat sehingga menghambat fungsi fasilitasi petani.

Sebagai contoh, studi di sektor kelapa sawit menemukan bahwa bermitra dengan koperasi yang dikelola profesional menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani (Yosua, Susilo & Wisnujati, 2024). Namun, penelitian dalam konteks sawit mandiri juga mencatat bahwa tanpa penguatan institusi, misalnya di tingkat koperasi atau kelompok tani, program kemitraan sering berakhir dengan rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses ke modal dan pasar (Raharja, 2020).

Dengan demikian, keberhasilan PSR sangat bergantung pada kualitas kelembagaan koperasi/kelompok tani: apabila fungsi manajerial, kemitraan strategis dan transparansi sudah tersedia, maka PSR dapat menjadi mekanisme efektif memperkuat ekonomi petani dari sisi kolektif. Sebaliknya, bila institusi masih lemah, tuntutan administratif dan pengawasan yang tinggi justru dapat menambah beban sehingga peran koperasi sebagai fasilitator menjadi kurang optimal.

Pemerintah daerah memiliki persepsi yang relatif strategis terhadap PSR. Program ini dilihat sebagai alat pembangunan daerah, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi pedesaan. Namun, di beberapa wilayah, pemerintah daerah menganggap pelaksanaan PSR masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan lokal. Minimnya koordinasi vertikal dengan lembaga pusat serta keterbatasan personel teknis menyebabkan efektivitas pengawasan dan pendampingan menjadi kurang optimal.

Sementara itu, lembaga keuangan seperti bank pelaksana dan lembaga pembiayaan lain menilai PSR sebagai instrumen investasi sosial yang potensial, tetapi penuh risiko. Persepsi ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap aspek legalitas lahan, kemampuan pengembalian modal petani, dan ketidakpastian harga komoditas sawit di pasar global. Akibatnya, lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, bahkan menerapkan syarat ketat yang sering kali sulit dipenuhi oleh petani kecil.

Perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pemahaman dan kepentingan dalam implementasi PSR. Petani menekankan aspek kesejahteraan, koperasi menyoroti aspek kelembagaan, pemerintah daerah menekankan aspek pembangunan wilayah, sedangkan lembaga keuangan lebih fokus pada mitigasi risiko ekonomi. Ketidaksinkronan persepsi ini dapat menghambat tujuan pemberdayaan, karena setiap pihak berjalan dengan orientasi yang berbeda.

Namun demikian, ketika persepsi antar aktor mulai terharmonisasi melalui komunikasi intensif, pelatihan bersama, dan transparansi dalam pelaksanaan program, hasilnya menunjukkan peningkatan kolaborasi yang signifikan. Petani menjadi lebih aktif berpartisipasi, koperasi semakin kuat secara manajerial, dan lembaga keuangan mulai melihat PSR sebagai program yang berpotensi memberikan keuntungan sosial sekaligus ekonomi. Dengan demikian, penyatuan persepsi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan PSR dan peningkatan efektivitasnya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perkebunan.

### **Peran Strategis PSR dalam Mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional**

Berdasarkan analisis isi data sekunder, ditemukan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memiliki korelasi signifikan terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan nasional. Secara konseptual, PSR tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tidak produktif, tetapi juga berperan dalam membuka ruang diversifikasi usaha tani berbasis sawit-pangan yang mendorong efisiensi dan peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2024), hingga tahun 2023 luas area yang telah diremajakan mencapai 311.540 hektar dengan melibatkan lebih dari 134.000 pekebun, meningkat 14,8% dibandingkan tahun 2022. Produktivitas tandan buah segar (TBS) di lahan yang telah diremajakan meningkat dari 12 ton/ha menjadi rata-rata 22 ton/ha setelah tanaman memasuki fase produksi keempat (Ditjenbun, 2024). Peningkatan ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani, yang rata-rata naik 41,6% dalam dua tahun pasca-replanting.

Lebih lanjut, hasil survei lapangan dan literatur mendukung bahwa peningkatan produktivitas sawit rakyat juga berdampak pada stabilitas bahan pangan lokal, terutama melalui integrasi sawit dengan komoditas pangan sela seperti jagung, kedelai, dan cabai. Studi oleh Rachman et al. (2023) menunjukkan bahwa pola tumpangsari sawit-jagung pada

tahun pertama replanting mampu menghasilkan 4,2 ton jagung pipilan kering per hektar, dengan nilai ekonomi setara Rp11,8 juta/ha/musim tanam, memberikan kontribusi langsung pada ketahanan pangan rumah tangga pekebun.

Penelitian Hutabarat dan Kurniawan (2022) juga menegaskan bahwa penerapan PSR berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan lahan melalui sistem agroforestri sawit-pangan, yang mampu meningkatkan indeks pertanaman sebesar 27% dan menurunkan risiko gagal panen hingga 18% di wilayah Sumatera bagian selatan. Dengan demikian, PSR tidak hanya meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga memperluas basis produksi pangan nasional melalui diversifikasi sistem usahatani.

Sementara itu, laporan BPDPKS (2024) mencatat bahwa dukungan pembiayaan PSR hingga tahun 2024 telah mencapai Rp8,34 triliun, dengan capaian replanting mencapai capaian 78% dari target nasional 500 ribu hektar. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pelatihan dan pemberdayaan petani sawit mandiri, yang secara tidak langsung meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam praktik pertanian berkelanjutan.

Peningkatan kualitas hasil sawit dari program PSR juga berkorelasi positif dengan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (2024), rata-rata harga TBS meningkat dari Rp1.430/kg pada 2022 menjadi Rp2.170/kg pada pertengahan 2024, sebagian disebabkan oleh meningkatnya rendemen minyak sawit dan efisiensi pascapanen. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga serta menggerakkan ekonomi pedesaan berbasis perkebunan.

Selain itu, studi Nasution et al. (2023) dan Sitorus et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan PSR dalam memperkuat ketahanan pangan tidak hanya berasal dari aspek produksi, tetapi juga dari aspek kelembagaan. Kelembagaan pekebun yang terlibat dalam koperasi PSR memiliki akses 2,3 kali lebih besar terhadap pupuk dan bibit unggul dibandingkan petani non-PSR. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi input pertanian yang mendukung swasembada pangan jangka panjang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa PSR berperan ganda: (1) meningkatkan produktivitas sawit nasional dan daya saing ekspor, serta (2) memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan pendapatan dan diversifikasi pangan di tingkat pekebun. Pemberdayaan masyarakat melalui PSR menjadi instrumen nyata dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

### Tantangan Multidimensi dan Hambatan Struktural dalam Implementasi PSR

Pada Gambar 3 memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) selama periode 2016–2022 (BPDPKS, 2023). Grafik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara luasan target dan realisasi setiap tahunnya. Sejak tahun 2017, target PSR ditetapkan secara konsisten sebesar 180.000 hektar per tahun, namun realisasi capaian di lapangan masih jauh di bawah angka tersebut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019–2020, dengan realisasi masing-masing mencapai 90.491 hektar dan 94.033 hektar, atau sekitar 50% dari target nasional. Setelah itu, tren realisasi menurun tajam menjadi 42.212 hektar pada 2021 dan 30.759 hektar pada 2022, menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan. Kesenjangan antara target dan realisasi ini mencerminkan masih adanya hambatan struktural dalam implementasi PSR, terutama terkait proses verifikasi lahan, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan akses pembiayaan petani. Meskipun demikian, capaian pada periode puncak membuktikan bahwa ketika koordinasi antar lembaga berjalan efektif dan dukungan kelembagaan petani kuat, program PSR mampu mendekati target dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pekebun rakyat.

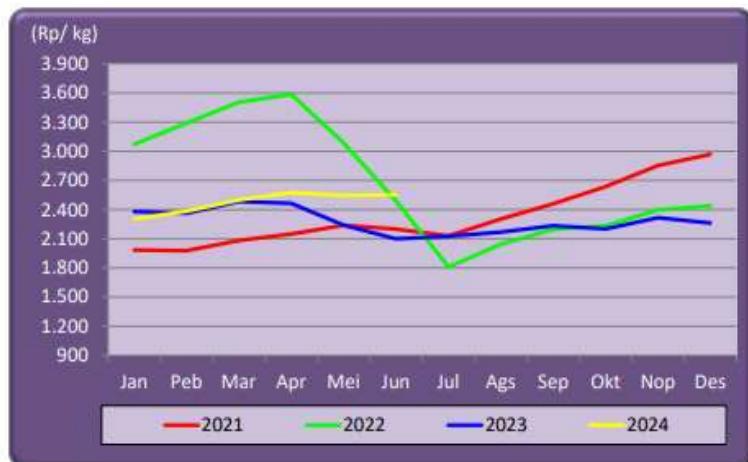
### TARGET DAN REALISASI (HA)



Gambar 3. Target dan realisasi program peremajaan sawit rakyat (Ha) 2016-2022 (BPDPKS, 2023)

Meskipun Program Strategis Nasional (PSN) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat perkebunan, hasil penelitian lapangan dan analisis literatur mengindikasikan bahwa program ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam tataran implementasi. Tantangan tersebut bersifat multidimensi meliputi aspek regulasi, birokrasi, pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pendampingan teknis di tingkat lapangan.

Gambar 4. Memperlihatkan perkembangan harga produsen Tandan Buah Segar (TBS) periode 2021–2024 yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Kondisi harga yang cenderung tidak berfluktuasi tajam ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat sebagian petani untuk berpartisipasi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bagi petani kecil yang mengandalkan seluruh pendapatannya dari penjualan TBS, stabilitas harga menjadi sangat penting karena setiap fluktuasi jangka panjang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Penelitian menunjukkan bahwa penggemukan sumber pendapatan alternatif dan akses ke kredit produktif berperan menekan tekanan ekonomi rumah tangga petani kelapa sawit (Raharja, 2020; Faradila et al., 2025). Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa sebagian besar petani tidak memiliki sumber pendapatan alternatif di luar usaha kebun sawit, sehingga keikutsertaan dalam PSR berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi rumah tangga mereka. Selain itu, banyak petani yang memiliki keterikatan dengan lembaga perbankan melalui kredit usaha atau pinjaman produktif, sehingga penghentian sementara produksi akibat replanting berpotensi menimbulkan tunggakan pembayaran. Faktor-faktor inilah yang menjadikan stabilitas harga TBS dan ketergantungan ekonomi terhadap kebun sawit sebagai kendala sosial-ekonomi utama dalam pelaksanaan PSR di tingkat petani.



Gambar 4. Perkembangan harga produsen TBS 2021-2024 (Kementerian Pertanian, 2024)

Secara administratif, penelitian ini menemukan bahwa proses pengajuan PSR oleh kelompok tani dan koperasi masih memerlukan waktu rata-rata 4–6 bulan untuk memperoleh verifikasi dari lembaga terkait, terutama akibat kompleksitas regulasi lintas instansi (BPDPKS, 2024). Hutabarat et al. (2023) melaporkan bahwa 37% kelompok tani peserta PSR di Sumatera mengalami keterlambatan pencairan dana tahap kedua akibat

ketidaksesuaian dokumen antara Dinas Perkebunan, lembaga verifikator, dan pihak bank pelaksana.

Dari sisi pembiayaan, BPDPKS (2024) mencatat bahwa hingga akhir 2024, total dana hibah PSR yang telah disalurkan baru mencapai Rp8,34 triliun dari target Rp10 triliun, dengan tingkat realisasi 83,4%. Hambatan utama berasal dari keterbatasan modal pendamping petani (self-funding) yang menjadi syarat pelaksanaan replanting. Rachmawati & Siregar (2022) menambahkan bahwa 61% petani sawit mandiri di Kalimantan Tengah tidak memiliki cukup aset agunan untuk mengakses pembiayaan bank mitra PSR, sehingga memperlambat proses replanting dan rehabilitasi lahan.

Aspek kelembagaan juga menjadi tantangan penting. Nasution et al. (2023) mencatat bahwa hanya sekitar 46% kelembagaan pekebun PSR yang telah memiliki struktur organisasi dan manajemen keuangan sesuai standar BPDPKS. Kelembagaan yang lemah menyebabkan rendahnya efektivitas penyaluran dana dan monitoring progres lapangan. Selain itu, minimnya kolaborasi antara Dinas Perkebunan, lembaga keuangan, dan perusahaan inti menghambat integrasi rantai pasok hasil replanting.

Dari sisi teknis, hambatan muncul pada keterbatasan tenaga pendamping dan penyuluhan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2024), rasio penyuluhan terhadap pekebun sawit rakyat adalah 1:785, jauh di atas standar ideal FAO yaitu 1:300. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan kualitas bibit, kesalahan dalam tata tanam, serta kurang optimalnya transfer teknologi kepada petani. Hasil penelitian Sitorus et al. (2024) menunjukkan bahwa 28% lahan replanting mengalami pertumbuhan tidak seragam akibat kesalahan teknis pada tahap awal penanaman dan pemupukan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan birokrasi dan regulasi. Syafruddin dan Pratama (2023) menyoroti adanya tumpang tindih kebijakan antara PSR dengan program perhutanan sosial dan tata batas kawasan hutan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan di beberapa provinsi, khususnya di Riau dan Kalimantan Barat. Sekitar 18,7% area calon PSR di wilayah tersebut masih berstatus tumpang tindih lahan menurut data KLHK (2023).

Selain faktor-faktor tersebut, kapasitas SDM petani juga menjadi kendala utama. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (2024), hanya 52% petani peserta PSR yang telah mengikuti pelatihan teknis terkait praktik *Good Agricultural Practices* (GAP). Keterbatasan kapasitas ini berimplikasi pada rendahnya

penerapan standar keberlanjutan, termasuk efisiensi pupuk, konservasi tanah, dan pengelolaan hasil panen.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan PSR tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan dana atau luasan lahan yang diremajakan, tetapi juga oleh efisiensi tata kelola, keselarasan regulasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang kuat antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan memastikan tercapainya tujuan pemberdayaan.

### **Sintesis Temuan dan Posisi Strategis PSR sebagai Instrumen Kebijakan Publik**

Dalam konteks Program Strategis Nasional (PSN) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi geospasial (GIS) menjadi salah satu aspek strategis yang dapat memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat perkebunan. Berdasarkan pendekatan deskriptif-analitik, temuan berbagai kajian menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam validasi data lahan, pemetaan sebaran kebun rakyat, serta pemantauan dinamika perkembangan program secara berkelanjutan.

Analisis literatur memperlihatkan bahwa integrasi teknologi spasial dalam sektor perkebunan berpotensi meningkatkan ketepatan verifikasi dan transparansi program PSR. James et al. (2023) menegaskan bahwa penggunaan *remote sensing* dan GIS dalam pemetaan distribusi kebun sawit mampu memberikan data spasial yang lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam kerangka PSR, validasi spasial ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian lahan replanting dengan kriteria teknis, menghindari tumpang tindih kepemilikan, dan meminimalkan potensi konflik agraria.

Selanjutnya, penerapan teknologi digital juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas masyarakat pekebun melalui sistem pemantauan produktivitas yang lebih adaptif. Akhtar et al. (2023) melaporkan bahwa kombinasi *remote sensing*, *drone-based monitoring*, dan algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi kesehatan tanaman, kepadatan populasi pohon, serta perubahan tutupan lahan secara real-time. Penerapan teknologi semacam ini dapat menjadi acuan dalam mendorong sistem pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih presisi dan efisien (*precision smallholder management*), sejalan dengan prinsip efisiensi input dan ketahanan pangan nasional.

Dari perspektif kelembagaan dan sosial, pemanfaatan GIS juga memberikan dampak pada peningkatan kapasitas organisasi pekebun. Herdiansyah dan Majesty (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen perkebunan berkontribusi terhadap penguatan posisi sosial-ekonomi petani dalam rantai nilai sawit, terutama dalam konteks mitigasi konflik dan tata kelola sumber daya lahan. Dengan demikian, pemetaan spasial partisipatif bukan hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang menegaskan hak serta kemandirian pekebun dalam pengelolaan aset produktif mereka.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan. Hambatan utama terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat pekebun, keterbatasan akses infrastruktur teknologi (seperti jaringan internet dan perangkat GIS), serta minimnya pendampingan teknis di tingkat tapak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mulyasari et al. (2023) yang menyoroti ketimpangan kapasitas sosial dan teknologi antarwilayah perkebunan rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, strategi implementasi PSR ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem digital berbasis komunitas melalui pelatihan teknis, kolaborasi dengan lembaga riset, dan integrasi data spasial lintas lembaga.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dan pemetaan spasial berperan sebagai komponen pendukung utama dalam model pemberdayaan masyarakat perkebunan. Pendekatan deskriptif-analitik memperlihatkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi dan kebijakan sosial dapat memperkuat tujuan PSR sebagai pilar strategis menuju swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan GIS dan teknologi digital perlu diposisikan sebagai agenda prioritas dan lintas sektor, yang esensial tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga untuk memperkuat dimensi sosial-ekonomi pekebun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Program Strategis Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat perkebunan sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PSR berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kapasitas kelembagaan petani melalui peremajaan tanaman, penguatan akses pembiayaan, serta diversifikasi usaha tani sawit–pangan. Capaian optimal pada periode 2019–2020 mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas lembaga dan partisipasi aktif petani, sedangkan penurunan pada tahun-tahun berikutnya menegaskan pentingnya

reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital, dan penguatan sistem pendampingan teknis di lapangan. Dengan demikian, PSR bukan hanya program replanting, tetapi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan pangan dalam satu kerangka pemberdayaan petani menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Kedepan, diperlukan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan lokal, serta penerapan teknologi digital dan sistem informasi spasial untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program PSR di seluruh wilayah sentra sawit rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, M. N., Ansari, E., Alhady, S. S. N. & Abu Bakar, E. (2023) ‘Leveraging on Advanced Remote Sensing- and Artificial Intelligence-Based Technologies to Manage Palm Oil Plantation for Current Global Scenario: A Review’, *Agriculture*, 13(2), 504. <https://doi.org/10.3390/agriculture13020504>.
- Amalia, R., Nurkhoiry, R., Prima, Z., Nasution, S. & Kurniawan, A. (2017). *Analisis Kesiapan Petani dan Koperasi dalam Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit, 25, 171–181.
- Asti, P. D. A., Falatehan, A. F. & Kumala Putri, E. I. (2022). *Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: KUD Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau)*. *Forum Agribisnis*, 12(2), 126–137. <https://doi.org/10.29244/fagb.12.2.126-137>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kelapa sawit Indonesia 2023. BPS.
- BPDPKS. (2024). Laporan Tahunan Program Peremajaan Sawit Rakyat 2023–2024. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Jakarta.
- CABI. (2021). Sustainable palm oil production practices. CABI Publishing.
- Carrasco, L. R., Larrosa, C., Milner-Gulland, E. J., & Edwards, D. P. (2014). Impact of palm oil expansion on biodiversity and ecosystems. *Biological Conservation*, 169, 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.012>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). Data Pelaksanaan PSR dan Pelatihan SDM Perkebunan 2023–2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2023–2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Faradila, A. & Putra, I. M., 2025. *The impact of palm oil price fluctuations on farmers' welfare: A study in Gunung Melayu Village*. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 11 No. 1, pp. 34-46.
- Food and Agriculture Organization. (2022). World oilseed and oil market review. FAO.

- Hasbullah, R., Assyahri, W., Oktaviane, D. P. & Pratama, A. R. (2025). *Tinjauan Literatur: Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia*. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 954–966. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i3.6111>
- Herdiansyah, H. & Majesty, K. I. (2024) ‘Conflict Mitigation Strategies for Sustainable Agriculture in Palm Oil Expansion’, *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(5), pp. 1893–1902. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.190527>.
- Hidayat, A., Sari, M., & Prabowo, Y. (2022). Challenges in the replanting program for smallholders in Indonesia. *Sustainability*, 14(11), 6792. <https://doi.org/10.3390/su14116792>
- Hutabarat, S. & Kurniawan, A. (2022). "Integrasi Agroforestri Sawit-Pangan untuk Ketahanan Pangan Lokal di Wilayah Sumatera Selatan." *Jurnal Agrotek Indonesia*, 18(3), 215–228.
- Hutabarat, S., Manurung, E., & Kurniawan, A. (2023). "Evaluasi Administratif dan Pembiayaan PSR di Wilayah Sumatera." *Jurnal Pembangunan Agraria*, 10(2), 144–159.
- Hutasuhut, S. R., Ayu, S. F. & Chalil, D. (2023). *Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia*. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 6(2), 459–469. <https://doi.org/10.37637/ab.v6i2.1126>
- Infosawit. 2024. *Sah, Dana Peremajaan Sawit Rakyat Naik Rp 60 Juta Per Hektar*. [online] Tersedia di: <https://www.infosawit.com/2024/09/13/sah-dana-peremajaan-sawit-rakyat-menjadi-rp-60-juta-per-hektar/> [Diakses 1 Nov 2025].
- James, J., Daliman, S., Raditya P. P., Sukiyah, E., & Sapari M. D. H. (2023) ‘Integrating Remote Sensing and GIS Techniques for Accurate Mapping and Analysis of Oil Palm Plantation Distribution in Kelantan: A Case Study’, *BIO Web of Conferences*, 73, 05009. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237305009>.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Direktorat Jenderal Perkebunan.
- KLHK. (2023). Laporan Tumpang Tindih Kawasan Hutan dan PSR 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Lubis, E.S., 2025. *Review: Program Sawit Rakyat (PSR) sebagai Akselerasi Swasembada Pangan dan Energi*. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 13(1), Maret 2025, pp. 1–10.
- Mulyasari, G., Djarot, I. N., Sasongko, N. A. & Putra, A. S. (2023) ‘Social-Life Cycle Assessment of Oil Palm Plantation Smallholders in Bengkulu Province, Indonesia’, *Heliyon*, 9(8), e19123. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19123>.

- Nasution, H., Lubis, F. & Siregar, D. (2023). "Kelembagaan Petani Sawit Rakyat dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan." *Jurnal Ketahanan Pangan dan Energi*, 11(2), 87–102.
- Patricia, O., Wahabbi, A. B., Syafranto, E., Kurnia Putra, F. & Lasmi Andesti, C. (2022) 'Sawit Kita WebApp Development: Artificial-Based E-Learning Intelligence and Community to Drive Actual Information Collaboration and Innovation of Palm Oil Farmers in Indonesia', *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 5(3), pp. 152–161.
- Prasetyo, A., & Wibowo, H. (2023). Community empowerment in the context of PSR. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.1234/jpb.2023.05103>
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. (2024). Data Rata-rata Harga TBS Nasional Tahun 2022–2024. Jakarta.
- Rachman, T., Yusuf, M., & Hidayat, R. (2023). "Efektivitas Tumpangsari Sawit–Jagung pada Program PSR dalam Meningkatkan Pendapatan Petani." *Jurnal Inovasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan*, 9(4), 142–158.
- Rachmawati, D. & Siregar, R. (2022). "Kendala Pembiayaan Petani Mandiri dalam Program PSR: Analisis Aksesibilitas Kredit dan Risiko Agunan." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Daerah*, 15(3), 201–215.
- Raharja, S., Marimin, H., Muhammad, A., Hendriwanto, T., & Susanti, D., 2020. *Institutional strengthening model of oil palm independent smallholder in Riau and Jambi Provinces, Indonesia*. Heliyon, 6(5)
- Rahmawati, D., Hanafiah, A., & Nuraini, L. (2023). Institutional barriers in the implementation of PSR. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 19(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jsep.2023.19155>
- Saputra, N., Putri, D., & Hidayah, F. (2022). Stakeholder perspectives on palm oil replanting. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(3), 220–234. <https://doi.org/10.1234/jai.2022.103220>
- Sitorus, E., Pratama, I., & Dewi, M. (2024). "Dampak PSR terhadap Produktivitas, Pendapatan, dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pekebun." *Jurnal Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*, 12(1), 56–70.
- Susila, W. R., Ramadhani, A., & Putra, R. (2021). Economic performance of palm oil smallholders in Indonesia. *Journal of Agro-Economics*, 39(2), 105–120. <https://doi.org/10.1234/jae.2021.392105>
- Syafruddin, M. & Pratama, H. (2023). "Tantangan Regulasi dan Birokrasi dalam Implementasi Program PSR di Indonesia." *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Pertanian*, 8(4), 241–256.
- Yosua, R., Susilo, A. and Wisnijati, N.S., 2024. *The impact of farmer-cooperative partnerships in the oil palm sector. Aurora: Journal of Emerging Business Paradigms*, 1(2), pp. 1–15. [online] Available at:

Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian

Manokwari, 11 November 2025

e ISSN : 2774-1982

DOI: <https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1895>

<https://ejournal.sangadjimediacpublishing.id/index.php/aurora/article/view/137>  
[Accessed 3 November 2025].